

**PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS SWASTA TAHUN 2014**

**Oleh : Kanisius Suban Keraf
Email : kanis.keraf@gmail.com
Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Education is a major effort in achieving the Indonesian government should a nation that is educating the nation. In the implementation of the education policy of the central government authorizes local governments to dapattercapai policies fairly and equitably. In Riau province, especially the city of Pekanbaru organized by the Department of Education Pekanbaru. Evidence of the implementation of education policy is by increasing the quality of education at all levels of education. On top Middle School should also be. Not only the National High School High School, but also private. Comparable to improving the quality of education, facilities and infrastructure supporting the achievement of quality improvement should also receive attention from the government primarily on Private High School. Therefore, researchers wanted to see and compare the role of the government, especially Pekanbaru City Pekanbaru City Department of Education in the Implementation of facilities and infrastructure of Top Private School puffy in 2014.

The purpose of this study is the first, to find out how the government's role in providing education Pekanbaru City on Private High School in 2014. Second, to find out what are the factors that affect the role of Pekanbaru city government in providing education at High School in 2014. Private research this method descriptive qualitative approach. The research location is Private School SMA Santa Maria Pekanbaru, Private High School Youth and Education Office of the city of Pekanbaru. Data collection through interviews as additional data is through observation of researchers, documents, journals, research reports and media / newspaper. Analysis of the data that have been collected using descriptive techniques.

Role of Pekanbaru City Department of Education in improving the quality of education in the form of teacher training in cooperation with the Institute for Education Quality Improvement, Provision of Assistance funds Operasioal School, and scholarship. as a coordination center and the center of the spread of information and data collection from any educational institution in the city of Pekanbaru. Limited authority becomes an excuse presented by the Education Office of Pekanbaru. According to the analysis of the author is trasmisi policy failures that caused the policy to be unfair and uneven and occurs

ketidakmaksimalan in the achievement of policy objectives. As a result the corresponding results of the analysis of all the data collected and interviews to the writer considered the most understand mengenai it was discovered that the infrastructure and facilities Private High School in the city of Pekanbaru not be authorized Pekanbaru City Department of Education. The impact of inequality others is happening to the achievement of quality education for benchmarks which can not be equated with one another between the education unit utamanya Private High School in 2014.

Keywords: Role of Government Pekanbaru, Pekanbaru City Education Department, Cast Policies

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada seseorang, agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi tingginya (Ki Hajar Dewantara).

Di Indonesia, pendidikan adalah juga merupakan pusat kebudayaan dan pengembangan kebudayaan. (Maman A. Djauhari/2006). pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 “ mencerdaskan kehidupan bangsa”, pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) bunyinya “ setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.”. Diberikan kewenangan pada Kementrian Pendidikan Nasional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (sistem pendidikan nasional), ini merupakan bentuk perhatian khusus atas pendidikan.

pelaksanaan pendidikan di Indonesia, dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama yaitu pemerintah sendiri (sekolah negeri) dan pihak kedua adalah masyarakat (sekolah swasta). Demikian juga dengan perkembangan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/ Sekolah

Menengah Kejuruan atau yang di sebut SMA/ SMK pada pembahasan seterusnya. Terlepas dari pada itu, hal yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, termasuk pemerintah adalah mengenai penjelasan yang terdapat pada pasal 55 ayat (4) pada UU No. 20 tahun 2003 yaitu, ” lembaga pendidikan berbasis masyarakat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber dana lainnya secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Tidak hanya itu, pada pasal 55 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 juga memaparkan “dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Hal ini menunjukkan bahwa posisi setiap sekolah baik negeri maupun swasta adalah sama di mata Undang-Undang dan aturan kebijakan serta implementasi atas suatu kebijakan.

Mutu pendidikan tidak hanya dengan memperhatikan tingkatan dan kemampuan mengajar dari guru (pengajar), namun juga selayaknya memperhatikan bagaimana kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran, serta kesiapan dari sarana dan prasarana yang dimiliki instansi pendidikan yang dapat

membantu membuat peserta didik lebih siap dan lebih mengerti dalam sebuah proses belajar mengajar.

Penjelasan diatas sejalan dengan pandangan Mulyasa (2007: 49) menyatakan bahwa: "Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut antara lain; gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat- alat dan media pengajaran". Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan atau pengajaran dalam proses pembelajaran, seperti halaman sekolah, kebun sekolah, taman sekolah dan jalan menuju sekolah.

Untuk standar sarana dan prasarana

SMA/MA/SMK/SMAS/SMKS dipaparkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007, bagian kelengkapan sarana dan prasarana yang berisikan:

- a. Ruang kelas
- b. Ruang perpustakaan
- c. Ruang laboratorium biologi
- d. Ruang laboratorium fisika
- e. Ruang laboratorium kimia
- f. Ruang laboratorium komputer
- g. Ruang laboratorium bahasa
- h. Ruang pimpinan
- i. Ruang guru
- j. Ruang tata usaha
- k. Tempat ibadah
- l. Ruang Konseling
- m. Ruang UKS
- n. Ruang Organisasi kesiswaan
- o. Jamban
- p. Gudang
- q. Ruang sirkulasi
- r. Tempat bermain/berolahraga.

SMA/ SMK Swasta tersebut memiliki visi dan misi masing-masing namun pastinya tetap bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memperoleh banyak ketidakadilan mengenai perhatian yang maksimal terutama dalam bidang sarana prasarana. Perbedaan perhatian pemerintah terutama pemerintah daerah Provinsi Riau khususnya pemerintah Kota Pekanbaru tidak hanya terjadi antara SMAN dengan SMAS saja, bahkan antara SMAS dengan SMAS juga demikian.

Pada pembahasan ini, lebih memberikan perhatian pada dua sekolah sebagai pembanding peran pemerintah terhadap perkembangan setiap hal di SMAS/ SMKS tersebut. Sekolah pertama yaitu SMA Santa Maria Pekanbaru dan sekolah kedua yaitu SMA Taruna. Kedua sekolah ini adalah sekolah dengan idiologi yang berbeda, cara belajar dan mengajar yang berbeda, sarana dan prasarana yang berbeda serta kualitas pendidikan yang berbeda.

Hal ini adalah sebuah masalah sosial, jika dilihat dari data tabel diatas, setiap fasilitas yang diterima siswa dibarengi dengan biaya untuk memperoleh fasilitas itu sendiri. Sekolah menjadi kegiatan yang mahal sekaligus menjadi wadah diskriminasi.¹ Terjadi suatu kompetisi, karena memang kurangnya perhatian pemerintah terhadap SMAS tersebut.²

Berbeda biaya membuat berbeda fasilitas, sama halnya hanya yang kaya yang dapat menikmati sekolah berkualitas dan tidak adanya batasan-batasan atau aturan main yang diberikan pemerintah (dinas terkait) terhadap pungutan biaya yang

¹ Eko,prasetyo. *Orang miskin di larang sekolah*,yogyakarta:resist book.februari 2006.

² ibid

dikenakan sekolah, serta banyaknya ketidakmampuan dinas terkait dalam menanggapi kebutuhan SMAS. Maka hal inilah yang menjadi sebuah masalah besar dalam pendidikan di kota Pekanbaru. Istilah “yang kaya yang pintar” menjadi sebuah pertanyaan besar. Maka dari pada itu, hal yang perlu dianalisis ialah **“Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Swasta Tahun 2014.”**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMA Santa Maria dan SMA Taruna tahun 2014?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan pada SMA Santa Maria dan SMA Taruna tahun 2014?

Kewenangan

Menurut Max Weber, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan dimana masyarakat memiliki kepercayaan bahwa kekuasaan tersebut memang berhak dan layak untuk dipatuhi.(Rianty Raffiudi: hal 3 .16). Koontz dan donnel mendefenisikan kewenangan sebagai kekuasaan yang sah memberikan hak untuk memerintah orang lain untuk bertindak atau tidak bertindak dalam suatu cara untuk pencapaian tujuan organisasi.(skripsi reski lestari: 2014)

Koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan,

mengkoordinasikan, unsur- unsur manajemen, dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.(hasibuan. 2011 : hal 85). Koordinasi digunakan sebagai patokan bahwa perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan berjalan lancar dan saling berkesinambungan. Koordinasi ada dua tipe, yaitu : koordinasi *vertikal* dan koordinasi *horizontal*.

Implementasi kebijakan

Menurut Willian N. Dunn analisis menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. (Dunn, 2003: 107-109). Implementasi kebijakan merupakan hubungan antara tujuan kebijakan dan realisasinya yang merupakan kegiatan pemerintah. (Van Meter dan Horn). Tujuan implementasi kebijakan sendiri adalah pencapaian dari kebijakan/ realisasi atas suatu kebijakan yang dibuat dalam kehidupan masyarakat.

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh (Grindle, merilee S, 1980 :11):

1. Isi Kebijakan:

- a. Kepentingan kelompok sasaran
 - b. Tipe manfaat
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Sumberdaya yang dilibatkan
- #### **2. Lingkungan Implementasi:**
- a. Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik lembaga dan penguasa
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Dalam pembuatan kebijakan pasti ada faktor- faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan,

hal tersebut antara lain (Islamy,1992:25):

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
- c. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
- d. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Menurut teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III, terdapat empat faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya pendukung, tingkah laku pelaksana dan sumber daya manusia(birokrasi/staf).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dari naskah wawancara, dokumentasi pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Setelah itu di jelaskan dengan cara deskriptif atau menggambarkan fenomena yang terjadi.

lokasi penelitian bertempat di Kota Pekanbaru yaitu di Sekolah Menengah Atas Swasta Santa Maria dan Sekolah Menengah Atas Taruna. Sekolah Menengah Atas Santa Maria yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito/ Gobah, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, dan Sekolah Menengah Atas Taruna Beralamat di Jalan Melur/ Gang Lili Nomor 40/ Suka Jadi, Kota Pekanbaru. Dua sekolah tersebut, merupakan sarana pembanding dari peran yang dilakukan pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Lokasi penelitian yang utama adalah Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Patimura No. 40A, Kecamatan Sail Bukit Raya, Kota Pekanbaru, kode pos 28126, nomor telp (0761)

42788 / (0761) 40695, alamat *email*: info@disdikpku.net, dan *webside*: <http://disdikpku.net/>, <http://disdikpku.org/>.

Mengapa kedua sekolah menengah swasta tersebut yang menjadi bahan perbandingan, di karenakan kedua sekolah swasta tersebut dapat mewakili sebuah sekolah swasta dengan biaya pendidikan yang mahal dan sarana prasarana yang lengkap serta sebuah sekolah swasta yang menetapkan biaya terbilang murah dengan sarana prasarana yang kurang memadai. Selain dari pada itu, hal utama adalah kedua sekolah tersebut selayaknya menjadi perhatian dari dinas pendidikan kota pekanbaru.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA SWASTA OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai bagian dari sistem pemerintahan Kota Pekanbaru pelaksana kebijakan dan teknis kependidikan mengembangkan Visi tersebut menjadi Misi Pendidikan, yaitu :*“Menjadikan Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Pendidikan Yang Berkualitas, Berbudaya Dan Religius Untuk Mencapai Masyarakat Madani”*

Pelaksanaan kegiatan pendidikan bukanlah hal yang mudah. Banyaknya instansi terkait dan bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan kemajuan perkembangan pendidikan menjadi salah satu penyebabnya.

Tidak hanya itu, bahkan dalam Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga terdapat pembagian bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kerjasama dan sinergisitas dari setiap bidang yang menjadi tolak ukur peran dari Dinas

Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pendidikan pada SMA Swasta di Kota Pekanbaru khususnya SMA Swasta Santa Maria dan SMA Swasta Taruna pada tahun 2014.

Beberapa bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada SMA Swasta pada tahun 2014:

1. Sebagai pusat koordinasi siswa baru pada saat pendaftaran masuk SMA Swasta di Kota Pekanbaru.

Pada tugas koordinasi, membina dan merumuskan penyusunan pedoman dan evaluasi penerimaan siswa baru dan pengembangan kurikulum sekolah menengah. Kepada penulis saat wawancara menjelaskan: *"Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai pusat informasi dan koordinasi serta mengarahkan setiap pencari sekolah (peserta didik) untuk dapat dengan mudah melanjutkan pendidikan di saat setelah tamat dari tingkat pendidikan sebelumnya. Karena mulai tahun 2015, pendaftaran siswa baru dilakukan di Dinas Pendidikan untuk setiap satuan pendidikan"*. (Wawancara 06 April 2015/ Dra. Hj. Lionarmi/ Kepala Seksi Sekolah Menengah)

Penulis juga tidak lupa bertanya mengenai manfaat yang diterima sekolah serta yang diperoleh Dinas Pendidikan dengan menetapkan pusat pendaftaran penerimaan siswa baru di kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Tanggapan dari Kepala Seksi Sekolah Menengah, yaitu: *"Pertama, pendataan setiap peserta didik lebih efektif dan efisien. Kedua, Murid-murid yang dari daerah tidak perlu pusing bertanya alamat setiap sekolah, hanya perlu datang ke kantor ini saja. Hal ini juga bermaksud agar Dinas*

Pendidikan tidak kecolongan dengan peserta didik yang membeli kursi karena terlambat mendaftar masuk sekolah. Hal tersebut termasuk dalam peran kami membina setiap satuan pendidikan". (Wawancara 06 April 2015/ Dra. Hj. Lionarmi)

2. Pelatihan guru (pendidik) untuk penerapan kurikulum 2013

Penulis menanyakan tentang peran pada bidang kurikulum dan perkembangannya pada masa sekarang ini. Jawaban yang diperoleh penulis yaitu:

"Perkembangan kurikulum selalu terjadi. Bahkan sudah berapa kali kita berganti kurikulum. Mulai dari KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), lalu KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan yang terakhir kurikulum 2013 yang diberlakukan secara nasional dan dilaksanakan setiap satuan pendidikan di setiap daerah. Namun ada hal yang tidak dapat dilepaskan yaitu tentang kewajiban setiap daerah menetapkan pelajaran muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan. Tidak hanya itu, perubahan kurikulum membuat setiap pengajar harus paham tentang bagaimana cara kerja sebuah kurikulum dan pelaksanaan disekolah nantinya. Maka Dinas Pendidikan mengadakan pelatihan guru melakukan kunjungan dan mendata setiap satuan pendidikan mengenai kemampuan pendidik dan daya tangkap peserta didik". (wawancara 06 April 2015/ Dra. Hj. Lionarmi).

3. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada siswa kurang mampu.

Sektor pendidikan tetap menjadi penerima alokasi dana APBD terbesar yaitu 37% dari APBD yang nilainya Rp. 1,969 triliun. Tidak hanya itu, anggaran sector pendidikan tidak hanya pada

Dinas Pendidikan tetapi juga terdapat di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya. Ujar Ayat Cahyadi". (antarariau.com/ 30 Mai 2014/ Bayu Agistari).

Diperkuat dengan hasil wawancara penulis Kepala Bagian Humas Sekretariat Kota Pekanbaru yaitu Alex Kurniawan menyatakan bahwa: *"Sebagai Instansi yang bertugas mencatat setiap kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Untuk Dinas Pendidikan, selain melakukan pencatatan kegiatan Dinas tersebut, kami juga membantu pada bidang pemberian beasiswa/ bantuan dana pendidikan bagi siswa tidak mampu atau siswa berprestasi. Namun sebelumnya sudah ada prosedur dari pihak kami dan pihak Dinas Pendidikan. Dimana setiap sekolah harus sudah melakukan pendataan secara bijak untuk mengetahui siapa saja siswanya yang memang layak menerima bantuan dana pendidikan dan beasiswa. Jika persyaratan dapat dipenuhi oleh pihak sekolah dan peserta didik, dapat dipastikan bantuan dana pendidikan dan beasiswa tersebut dapat diberikan."* (Wawancara/ 07 April 2015).

Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pada Bidang Sarana dan Prasarana SMA Swasta Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Negeri maupun Swasta. Adapun Standar Nasional Sarana Prasarana Pendidikan adalah sebagai berikut: Ruang kelas, Ruang perpustakaan, Ruang laboratorium biologi, Ruang laboratorium fisika, Ruang laboratorium kimia, Ruang laboratorium komputer, Ruang

laboratorium bahasa, Ruang pimpinan, Ruang guru, Tempat ibadah, Ruang konseling, Ruang UKS, Ruang organisasi kesiswaan, Jamban, Gudang, Ruang sirkulasi, Tempat bermain/berolahraga.

Adanya batasan kewenangan dari Dinas terkait membuat suatu kebijakan tidak dapat berjalan baik dan efisien, di tambah lagi apabila koordinasi antar pihak terkait tidak berjalan baik dan mendapat hambatan serta dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan maka akan semakin tidak maksimalnya kebijakan tersebut.

Peran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terbatas oleh kewenangan. Walaupun dalam beberapa hal, jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam kebijakan, sudah dapat dijalankan oleh Dinas tersebut. Namun terlepas dari pada itu, masih ada tugas pokok dan fungsi yang berjalan kurang maksimal. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya asumsi bahwa peran Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terutama dalam penyelenggaraan pendidikan pada SMA Swasta tidak berjalan efisien dan terlaksana maksimal utamanya dalam hal sarana dan prasarana sekolah menengah atsa swasta di Kota Pekanbaru.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Swasta Tahun 2014

Komunikasi

Komunikasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang

melaksanakan keputusan terhadap sebuah kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Teori implementasi kebijakan George Edwards III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Jika sebuah kebijakan ingin dilaksanakan secara tepat, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk tersebut harus jelas.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmisi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyaluran informasi mengenai suatu kebijakan atau aturan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang selanjutnya diteruskan kepada seluruh satuan pendidikan di Kota Pekanbaru.

Faktor kedua dari komunikasi adalah kejelasan. Kejelasan dari sebuah kebijakan sudah pasti tidak sampai kesatuan pelaksana kebijakan jika trasmisinya sudah gagal atau tidak akan maksimal jika trasmisi sebuah kebijakan sudah tidak maksimal.

Faktor ketiga dari komunikasi adalah konsistensi. Konsistensi diartikan sebagai suatu hal yang sudah mantap sesuai ketetapan yang ada dan siap untuk dilaksanakan. Persiapan dalam menghadapi suatu perubahan, termasuk pembangunan dan perkembangan zaman dalam hal pendidikan. Untuk terlaksananya suatu kebijakan, saat informasi dapat sampai secara maksimal, maka penerapan secara konsisten atau terus menerus dari suatu kebijakan, dapat dengan mudah dilakukan karena

sudah terbiasa dilaksanakan. Dalam implementasi kebijakan, konsistensi merupakan wujud nyata pelaksanaan kebijakan. Dilakukan sehari-hari dan semakin disebarluaskan.

Sumber Daya

Sumber daya meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas yang mendukung jalannya kebijakan.

Staf dalam hal ini adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang diperuntukan melakukan suatu kebijakan yang dicanangkan pemerintah.

Informasi merupakan hal yang penting. Pada kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam hal sarana dan prasarana untuk SMA/ Sederajat dapat dikatakan sangat sulit untuk mendapatkan informasi dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Wewenang berperan untuk memastikan bagaimana terlaksananya suatu kebijakan secara maksimal atau tidak maksimal. Wewenang juga mampu membuat suatu kebijakan berjalan dengan maksimal. Wewenang lebih kepada rasa percaya dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain.

Fasilitas berupa kantor sebagai pusat koordinasi dan sarana lainnya yang digunakan untuk penyebaran informasi baik kepada pihak sekolah maupun kepada publik/ masyarakat. Dalam hal kebijakan mengenai bantuan berupa sarana dan prasarana dapat disampaikan secara luas dan dapat diupayakan terlaksana dengan mudah apabila fasilitas-fasilitas yang ada dapat mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Fasilitas yang ada di dinas

pendidikan Kota Pekanbaru yang paling terlihat adalah bangunan dan perangkat multimedia.

Tingkah Laku Pelaksana

Tindakan berupa tingkah laku atau kebiasaan yang mengikuti seperti keadaan sebelumnya, merupakan suatu kecenderungan dari pelaksana kebijakan. Kecenderungan inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berjalan secara maksimal dan efektif. teori Edwards III bahwa sifat badan-badan pemerintahan yang memiliki cara perekrutan staf dengan latar belakang yang relatif sama memiliki kecenderungan tingkah laku/ cara bertindak yang sama pula. Terbukti, Kepala-Kepala seksi yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/ Sederajat berkilah bahwa merupakan bukan kewenangan dari bagiannya melainkan dari Pemerintah Pusat yang dalam artian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Untuk Dinas Pendidikan, mayoritas latar belakang pendidikan seorang staf idealnya adalah seorang yang tamatan pendidikan Strata Satu. Umumnya telah menyelesaikan pendidikan Strata satu (S-1) bidang pendidikan. Hal ini karena staf Dinas Pendidikan tidak hanya mengurus masalah administrasi tetapi juga harus mengetahui tentang penyelenggaraan pendidikan terutama di Kota Pekanbaru.

Selain dari pada itu, perekrutan staf juga selayaknya sesuai dengan posisi yang dibutuhkan pada dinas terkait. Jika Dinas Pendidikan Membutuhkan seorang yang mengetahui setiap aturan perundang-undangan pemerintah terkait dengan masalah pendidikan, maka yang diperlukan adalah seorang

yang tamatan Strata Satu bidang hukum karena lebih mengetahui tentang aturan tersebut.

Struktur Birokrasi

Stuktur birokrasi diartikan sebagai sebuah cara yang layak dan tepat untuk mencapai tujuan.

(1). Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan syarat sebuah cara yang layak dapat ditemukan dan diterapkan. Dinas pendidikan Kota Pekanbaru mendapat teguran di tahun 2014/2015 atas dasar SOP pelayan publik (metroriau/ Kamis 04/12/2015). SOP digunakan sebagai pembatas dan penunjukan suatu pekerjaan di bawah tanggung jawab dan naungan pihak yang semestinya.

(2). Fragmentasi yang digunakan sebagai jembatan atas setiap SOP yang sudah ada dan pihak yang bertanggung jawab atasnya untuk saling berkoordinasi agar setiap tujuan dapat tercapai serta menghilangkan ketimpangan pihak pihak berkepentingan. Jika fragmentasi dapat berjalan dengan baik, koordinasi lancar, setiap tugas dan tanggung jawab setiap bidang dilaksanakan. Setiap badan/instansi yang terkait melaksanakan kebijakan tanpa keluar dari tugas dan tanggung jawabnya, maka akan tercipta suatu hal yang terfokus untuk pencapaian implementasi kebijakan tanpa ada yang melampaui batasan kapasitasnya sebagai bagian dari suatu instansi.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru) pada SMA Swasta antara lain: pelatihan pengajar/guru, sertifikasi guru, pelaksanaan kurikulum 2013, pemberian dana

BOS. Pelatihan guru merupakan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan provinsi bekerjasama dengan Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). *“Mutu SMA Swasta atau Negeri di kota pekanbaru dapat dilihat dari mutu para pendidik (guru) dan cara mereka memberi pengajaran. Maka dari itu, seperti yang selalu kami adakan yaitu pelatihan dan penyuluhan kepada para pengajar.”* Ujar Drs. Zukirman Wawancara 14 September 2014. Dalam pelatihan tersebut juga sekaligus penilaian sertifikasi pendidik dan cara mengajar kurikulum 2013.

“Bantuan yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu pelatihan, penyuluhan dan jika dana berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), itupun hanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu serta penyerahannya sesuai prosedur yang berlaku”. (Wawancara 06 April 2015/ Dra. Hj. Lionarmi) Untuk SMA, dana BOS hanya dapat disalurkan apabila pihak sekolah sudah memberi data kepada Dinas Pendidikan tentang siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu serta melampirkan semua persyaratannya.

Dalam bidang sarana dan prasarana penunjang tercapainya mutu pendidikan, Dinas Pendidikan kota pekanbaru hanya sebatas koordinasi dan pemberian surat rekomendasi pengurusan izin permohonan bantuan. Selain itu, dari yang sudah di dapat penulis, terdapat banyak transfer informasi yang tidak maksimal antara bidang –bidang dalam dunia pendidikan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Saran

1. Selain dari pada memperhatikan kurikulum dan peningkatan mutu secara non fisik, setiap sekolah baik Sekolah Menengah Atas Negeri atau Sekolah Menengah Atas Swasta harus mendapat perhatian dalam bidang sarana dan prasarana terlebih dahulu. Hal tersebut karena, pembangunan non fisik tanpa dibarengi pembangunan fisik hanya akan semakin mempersulit peserta didik untuk memahami apa yang mereka pelajari.

2. Diperlukan perhatian khusus atau tim khusus dari pihak kementerian pendidikan untuk mengawasi dan memonitor tentang terlaksananya suatu kebijakan secara merata atau tidak di setiap daerah dan instansi pemerintahan. Selain dari pada itu, perlu adanya standar nasional tentang pungutan biaya sekolah, baik itu biaya pembangunan, uang sekolah perbulan, dan keunagan lainnya yang di pungut dari pihak peserta didik. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal pembangunan, pendidikan, sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lain. Standar tersebut dapat ditentukan dengan mengirim badan khusus yang melakukan pengkajian atas hal tersebut.

3. Keterlibatan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pendidikan dapat diberikan wadah dengan mempermudah proses serta tatacara agar masyarakat dapat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain dari itu, mempermudah suatu informasi tentang pendidikan sampai kepada semua pihak atau khalayak umum dengan menempel pengumuman pada tempat umum

atau dipapan pengumuman di sekitar dinas pendidikan dapat membantu penyebaran informasi tentang pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. Akan lebih baik jika pemerintah Kota Pekanbaru tidak hanya dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang hanya dapat memberikan surat izin dan menandatangani permohonan untuk di sampaikan ke Pemerintah Pusat, tetapi lebih memaksimalkan otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan kata lain, sebaiknya pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan keputusan kementerian tanpa harus mengembalikan keputusan tersebut kepada Kementerian Pendidikan di Pemerintahan Pusat.

5. Berharap peraturan tentang penerimaan hak yang sama, mutu pendidikan yang sebanding, pembiayaan pendidikan yang sebanding, sarana, prasarana pendidikan yang sebanding antara SMA Negeri dan SMA Swasta dapat terlaksana dan terimplementasi agar tidak terjadi kesenjangan dan perbedaan kualitas pendidikan pada SMA Negeri dan Swasta. Dengan terimplementasinya kebijakan tersebut, terdapat harapan supaya adanya persamaan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap sekolah utamanya SMA Swasta, hal tersebut karena tidak akan ada lagi SMA Swasta yang memiliki dana dan modal besar dan SMA Swasta yang memiliki modal kecil.

Daftar Pustaka

Dwi Narwoko dan Suyanto Bagong. 2011. *Sosiologi Teks*

Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.

Eko,Prasetyo. 2006. *Orang Miskin Di Larang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book.

Hasibuan, Melayu. 2011. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung

Mirriam Sjoftyan Arif, Dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Nana Sudjana. 2006. *Standar Mutu Pengawas Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.

Rianty Raffiudin, Dkk. 2011. *Teori Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas

Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suyanto Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Winarno,Budi.2002. *Teori dan Prose Kebijakan Publik*". Yogyakarta: Media Pressindo

Yoyon Bahtian Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep Teori, dan Model Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Achmad Muharam Nurjaman. *Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pendidikan Terhadap Profesionalisme Guru Sma*

- Al-Muawanah Cianjur*. Skripsi. Program Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Surya Kencana Cianjur. 2013
- Dewi Narsih, *Program Pengalaman Lapangan (PPL) SMA Taruna Mandiri Pekanbaru Tahun Ajaran 2015/2016*. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Laporan Observasi. 2015. Pekanbaru.
- Meli Yanti Harahap. *Faktor-Faktor Kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.14 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Seberang)*. Jurusan Ilmu pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. 2011. Pekanbaru .
- Reski Lestari. *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Siak*. 2014. Pekanbaru.
- Rereantina Gempita Ayudya, 2015. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Pelaksanaan Kurikulum 2013 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru. 2015
- Sintong Ketler. *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014*. 2014. Pekanbaru.
- Suci Ira Mega. *Peran e-governmant pada Dinas Komunikasi Informasi dan Pengelolaan Data Elektronik Provinsi Riau*. Skripsi. Administrasi Negara. Fisip. Universitas Riau. 2013. Pekanbaru.
- Tri Wulandari. *Program Pengalaman Lapangan SMA Taruna Mandiri Pekanbaru*. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Jurusan Bahasa dan Seni. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Unrivesitas Riau. 2015
- Keputusan Mendikbud No. 020/U/1998
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewewenangan Daerah Provinsi Riau*.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008
- Peraturan Gubernur Riau No. 13 Tahun 2009 Pasal 9 tentang uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2009 *tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Riau*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 tahun 2007 *tentang standar nasional sarana dan prasarana pendidikan*

Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2005 *tentang standar
nasional pendidikan*

Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 84 tahun 2013 *tentang
rincian tugas, fungsi dan tata
kerja dinas-dinas di
lingkungan pemerintah Kota
Pekanbaru*

Undang-Undang No.20 Tahun 2003
*Tentang Sistem Pendidikan
Nasional*

Maman A. Djauhari. 2006. Jurnal
Sosioteknologi Edisi 9.
Pendidikan Untuk Apa.

Robertus Na Endi Jawing. 2012.
*Analisis Kewenangan Khusus
Jakarta Sebagai Ibu*

*Kota Negara Dalam Konteks
Desentralisasi Di Indonesia.*
Program Pascasarjana Ilmu
Administrasi. Universitas
Indonesia.

Edi Satriadi. 2010. *Efektivitas
Implementasi Manajemen
Strategi Dalam Peningkatan
Mutu Pendidikan (Studi
Kasus di Universitas Bung
Hatta Padang Tahun 2004 s/d
2009).* Jurnal Akses Januari
2015.